

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada penelitian di atas, kesimpulan yang dapat ditarik adalah implementasi *e-government* melalui Aplikasi Sentuh Tanahku di Kantor Pertanahan Kota Tegal sudah berjalan tetapi kurang baik dan optimal pelaksanaannya yang dikatakan masih belum sesuai dengan standarisasi kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional. Kebijakan Aplikasi Sentuh Tanahku masih belum bisa diterima oleh banyaknya masyarakat Kota Tegal, karena keterbatasan dalam pengenalan serta kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan-kebijakan baru yang dibuat oleh Pemerintah.

Implementasi aplikasi Sentuh Tanahku di Kantor Pertanahan Kota Tegal telah meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Penggunaan teknologi dalam pelayanan pertanahan membantu mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan pertanahan. Implementasi *e-government* melalui Aplikasi Sentuh Tanahku di Kantor Pertanahan Kota Tegal ditujukan agar kebijakannya berjalan secara efektif dan efisien. Implementasi Kebijakan yang dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Pada aspek Komunikasi menurut standarisasi dan sasaran implementasi kebijakan yang berhasil dicapai, Implementasi Kebijakan Aplikasi Sentuh Tanahku di Kantor Pertanahan Tegal

dikategorikan sudah sesuai dengan kebutuhan. Walaupun dilihat dari sudut pandang minat masyarakat yang masih enggan untuk menggunakan kebijakan Aplikasi Sentuh Tanahku. Banyak masyarakat Kota Tegal yang belum memanfaatkan layanan pertanahan melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Hal ini menunjukkan rendahnya minat atau ketidakmampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi untuk pelayanan pertanahan. Minimnya pemahaman teknologi di kalangan masyarakat Kota Tegal menjadi tantangan utama dalam adopsi aplikasi Sentuh Tanahku. Banyak masyarakat yang belum familiar dengan penggunaan aplikasi berbasis teknologi untuk pelayanan publik. Komunikasi yang masyarakat mau dan terjadi saat ini masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, artinya belum berubah dan berkembang secara optimal. Pelaksanaan aspek Komunikasi ini dijalankan sesuai dengan kaidah birokrasi di Kantor Pertanahan Kota Tegal. Dengan komunikasi maka tujuan dan sasaran dari kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atau penolakan atas kebijakan tersebut. Komunikasi menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman pada kebijakan maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya. Yang sangat disayangkan Kantor Petanahan Kota Tegal tidak melakukan penyebarluasan Aplikasi Sentuh Tanahku melalui pemanfaatan

media sosial. Padahal, dengan adanya aplikasi ini kepuasan masyarakat terhadap layanan pertanahan meningkat. Mereka merasa lebih mudah dan cepat dalam mendapatkan informasi dan menyelesaikan urusan pertanahan tanpa harus datang langsung ke kantor pertanahan.

- 2) Pada aspek Ketersediaan Sumber Daya menurut standarisasi dan sasaran berdasarkan implementasi kebijakan yang berhasil dicapai, penyelenggaraan kebijakan baru melalui Aplikasi Sentuh Tanahku di Kantor Pertanahan Kota Tegal dikategorikan sudah dijalankan dengan baik. Implementasi aplikasi ini juga berdampak positif pada pegawai Kantor Pertanahan Kota Tegal. Beban kerja mereka berkurang karena banyak proses administratif yang dapat dilakukan secara otomatis melalui aplikasi. Kantor Pertanahan Kota Tegal melakukan penyelenggaraan dengan memperkenalkan kebijakan Aplikasi Sentuh Tanahku kepada masyarakat melalui sumber daya yang telah di dukung. Upaya sosialisasi dan pelatihan yang menyeluruh telah meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan cara penggunaan aplikasi. Hal ini berkontribusi pada peningkatan jumlah pengguna aplikasi dan tingkat kepuasan yang tinggi di kalangan masyarakat. Dengan memajang poster, banner atau spanduk di Kantor Pertanahan Tegal, maka nantinya akan mengundang minat masyarakat yang melihat dan mungkin akan mulai bisa menerima kebijakan penggunaan

Aplikasi Sentuh Tanahku. Karena, Implementasi kebijakan tidak akan efektif jika para implementor kekurangan sumber daya yang penting untuk melaksanakan kebijakannya.

- 3) Pada aspek Sifat dan Komitmen menyesuaikan Standarisasi dan sasaran berdasarkan implementasi kebijakan yang berhasil dicapai, mengenai penyelenggaraan Kebijakan Aplikasi Sentuh Tanahku di Kantor Pertanahan Kota Tegal sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan kebutuhan. Kebijakan Aplikasi Sentuh Tanahku harus memiliki sifat fleksibel yang memungkinkan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Kota Tegal. Aplikasi ini harus mampu beradaptasi dengan berbagai tingkat pemahaman teknologi di kalangan masyarakat. Dimana pihak staff dan para pegawai Kantor Pertanahan Tegal masih memiliki rasa bertanggung jawab, rasa empati, tenggang rasa, dan peka dengan masukan masyarakat terhadap kebijakan baru berupa Aplikasi Sentuh Tanahku. Minat masyarakat yang kurang tidak membuat pihak Kantor Pertanahan menjadi menolak kebijakan baru yang masuk. Ketika sikap atau pandangan para pelaksana berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses akan pelaksanaan sebuah kebijakan akan menjadi kompleks. Berhasil atau tidaknya kebijakan dapat dilihat dari sifat atau ciri-ciri badan/instansi pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok

dengan para badan atau instansi pelaksananya. Komitmen ATR/BPN Kota Tegal untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai penggunaan aplikasi telah diimplementasikan melalui tutorial, sesi pelatihan, dan dukungan teknis yang responsif. Pelayanan yang optimal melalui aplikasi ini juga telah dijaga, memastikan pengguna mendapatkan bantuan yang memadai.

- 4) Pada aspek Struktur Birokrasi menyesuaikan standarisasi dan sasaran berdasarkan implementasi kebijakan yang berhasil dicapai, Implementasi Kebijakan terhadap Aplikasi Sentuh Tanahku di Kantor Pertanahan Kota Tegal telah dijalankan dengan optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Tegal. Sebagaimana semestinya kebijakan baru pasti akan melalui tahapan uji coba yang sesuai dengan kaidah aturan sebuah instansi publik. Kantor Pertanahan Kota Tegal menerima dengan lapang masuknya kebijakan baru yang dibuat oleh Pemerintah melalui Aplikasi Sentuh Tanahku. Walaupun pihak Kantor Pertanahan tahu akan banyak masyarakat yang masih enggan untuk menerima kebijakan tersebut. Karena, Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan memegang peranan yang sangat penting, karena berkaitan dengan prosedur, sistem kerja, pembagian kerja, wewenang dan koordinasi antar instansi.

5.2. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas mengenai implementasi *e-government* melalui Aplikasi Sentuh Tanahku di Kantor Pertanahan Kota Tegal sebagai perwujudan pelaksanaan reformasi kebijakan baru yang mana akan menyesuaikan Standarisasi dan sasaran berdasarkan implementasi kebijakan yang berhasil dicapai, maka dapat melakukan upaya yang lebih sebagai berikut:

- 1) Secara Umum, pelaksanaan Kebijakan baru di Kantor Pertanahan khususnya pada wilayah Tegal masih sangat kurang optimal penyelenggaraannya. Kemampuan dalam menerima kebijakan baru yang berbasis teknologi berupa Aplikasi Sentuh Tanahku masih belum sepenuhnya dapat diterima oleh banyaknya masyarakat. Walaupun secara garis kebutuhan sudah baik karena selalu menyesuaikan kebutuhan masyarakat, tetapi tetap saja sebuah kebijakan apalagi kebijakan baru harus terus menerus dijalankan agar reformasi birokrasi negara dapat berjalan dengan baik dan berhasil. Bahwa faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sangat berpengaruh terhadap efektivitas berhasilnya penyelenggaraan Kebijakan. Implementasi kebijakan Aplikasi Sentuh Tanahku di Kantor Pertanahan Kota Tegal menunjukkan keberhasilan dalam menyesuaikan aspek sifat dan komitmen dengan standarisasi dan sasaran yang telah ditetapkan. Aplikasi ini berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik di

bidang pertanahan dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat Kota Tegal.

- 2) Dalam aspek Komunikasi, Sebenarnya sudah baik secara garis besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Tegal. Di wilayah Kantor Pertanahan Kota Tegal sudah melakukan pengenalan secara singkat kepada masyarakat. Tetapi, upaya yang dipilih sebenarnya sangat membatasi kebijakan baru yang masuk, dengan masyarakat memilih untuk tetap berpegang teguh pada kebijakan lama. Padahal jika Kantor Pertanahan Kota Tegal melakukan beberapa strategi yang lebih menarik terhadap layanan kebijakan Aplikasi Sentuh Tanahku, maka lambat laun masyarakat Tegal akan mengalami ketertinggalan dalam kebijakan selanjutnya. Pengenalan Aplikasi Sentuh Tanahku bisa dikenalkan kepada masyarakat melalui berbagai macam strategi, terutama di era yang sudah canggih ini masyarakat akan mudah tertarik mengenal sesuai melalui apa yang mereka liat di ponsel atau gadget mereka. Penyebaran atau pengenalan Aplikasi Sentuh Tanahku bisa disebar luaskan menggunakan media sosial atau platform digital yang banyak di akses oleh masyarakat. Seperti halnya melalui Instagram dan Tiktok, dua aplikasi ini menjadi pusat informasi dan kiblat masyarakat. Dari aplikasi tersebut, seharusnya pihak Kantor Pertanahan Kota Tegal bisa melakukan penyebaran pengenalan Aplikasi Sentuh Tanahku dengan membuat reels di isntagram,

membuat postingan yang menarik, membuat konten-konten yang menarik di Tiktok agar mencapai *Fyp (For Your Page)* atau banyak masuk ke akun akun masyarakat yang tanpa disadarai akan membuat masyarakat semakin paham akan Aplikasi Sesentuh Tanahku. Dengan begitu, Kebijakan Aplikasi Sentuh Karena pada dasarnya kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan/program dengan para pemangku kepentingan atau masyarakat umum. Dengan komunikasi, maka tujuan dan sasaran dari kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atau penolakan atas kebijakan tersebut. Komunikasi menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman pada kebijakan, maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.

- 3) Dalam aspek Ketersediaan Sumber Daya, Penyelenggaraan kebijakan baru melalui Aplikasi Sentuh Tanahku di Kantor Pertanahan Kota Tegal dikategorikan sangat kurang efektif. Pihak Kantor Pertanahan Kota Tegal sangat minim dalam mendukung sumber daya untuk kebutuhan kebijakan. Sepatutnya mereka berperan lebih banyak untuk memperkenalkan kebijakan baru agar diminati dan diakses oleh masyarakat Tegal, bukan hanya menggunakan poster, banner, atau spanduk saja. Padahal, arti kebijakan publik merupakan salah satu program yang menyertakan

sarana dan prasarana yang dibuat oleh suatu organisasi atau institusi publik yang membutuhkan penerapan dan tujuan dengan mempertimbangkan berbagai hal yang menghambat dan mendukungnya.

- 4) Dalam aspek Sifat dan Komitmen, Penyelenggaraan kebijakan baru melalui Aplikasi Sentuh Tanahku di Kantor Pertanahan Kota Tegal dikategorikan sangat kurang efektif. Pihak Kantor Pertanahan Kota Tegal sangat minim dalam mendukung sumber daya untuk kebutuhan kebijakan. Sepatutnya mereka berperan lebih banyak untuk memperkenalkan kebijakan baru agar diminati dan diakses oleh masyarakat Tegal, bukan hanya menggunakan poster, banner, atau spanduk saja. Padahal, arti kebijakan publik merupakan salah satu program yang menyertakan sarana dan prasarana yang dibuat oleh suatu organisasi atau institusi publik yang membutuhkan penerapan dan tujuan dengan mempertimbangkan berbagai hal yang menghambat dan mendukungnya.
- 5) Dalam aspek Struktur Birokrasi, Pelaksanaan implementasi kebijakan Aplikasi Sentuh Tanahku di Kantor Pertanahan Kota Tegal sudah berjalan secara optimal. Aturan yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Tegal dalam menerima kebijakan baru sudah sesuai. Dengan menerima secara terbuka, melakukan uji coba mengenai kebijakan baru, serta mau memperkenalkan ke khalayak masyarakat sudah menunjukkan sebuah struktur birokrasi yang baik.

Pelaksanaan kebijakan dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan pemerintahan.

